

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu persoalan yang konstan di Indonesia dan meskipun pemerintahan silih berganti korupsi selalu menjadi isu politik utama. Korupsi yang melibatkan para petinggi politik dan elite pemerintahan menjadi lazim terjadi, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di sejumlah Negara berkembang, baik yang menjalankan sistem politik yang otoriter maupun mereka yang mengklaim diri sebagai Negara demokrasi sekalipun.<sup>1</sup> Sudah tidak perlu ditegaskan lagi, korupsi adalah masalah utama bangsa ini. Tentu saja masih banyak permasalahan bangsa yang lainnya, tetapi korupsi adalah akar permasalahannya.<sup>2</sup>

Agenda pemberantasan korupsi di Indonesia pasca-reformasi tampak harus menghadapi dilema ketika berhadapan secara diametral<sup>3</sup> dengan realitas perubahan politik yang paradoks. Pasca-tumbangnya pemerintahan Orde Baru, sejumlah upaya perubahan radikal dalam sistem politik telah dilakukan. Akan tetapi, pembaruan itu justru menyeret bangsa ini ke dalam ironi-ironi berupa menjamurnya celah sistem dan kebijakan yang membuka peluang bagi suburnya praktik korupsi di negeri ini.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014. Hlm 2 dan 42.

<sup>2</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Malang, Intrans Publishing, 2016. Hlm 1.

<sup>3</sup>Pengertian menurut KBBI, Diametral/ di-a-met-ral/ menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seperti diameter; terbagi dua (oleh garis pemisah) terpisah secara berhadapan-hadapan (Online) [kbbi.we.id/diametral](http://kbbi.we.id/diametral) di akses 23 Mei 2016

<sup>4</sup>Moh. Mahfud MD. *Op cit*. Hlm 1

Untuk meningkatkan kualitas lembaga antikorupsi yang sudah ada sebelumnya (*triggering mechanism*), maka lahirlah suatu inisiatif baru serta ikhtiar yang sangat besar dari kalangan aktivis, akademisi, dan sejumlah politikus untuk mendirikan suatu lembaga pemberantasan korupsi yang independen, netral, dan agresif dalam melakukan jihad melawan korupsi. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga baru sebagai “anak kandung reformasi”.<sup>5</sup> Berdirinya KPK juga sebagai bentuk kritik terhadap lembaga pemerintah (Kejaksaan dan Kepolisian) yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun.<sup>6</sup>

KPK dengan segala kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang telah bekerja dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi yang besar pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun dalam melaksanakan tugasnya KPK menghadapi kendala antara lain berkaitan dengan

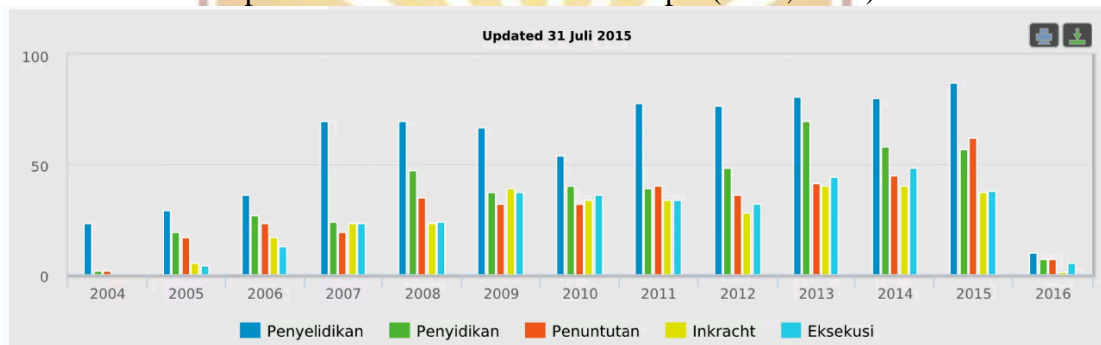
---

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm 50

<sup>6</sup>KPK.go.id. *Sekilas Tentang KPK*. Lihat: <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>. di akses 19 Mei 2015

nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang belum menunjang. Oleh karena itu perlu dibudayakan nilai-nilai dan sikap anti korupsi dalam masyarakat, agar penanggulangan tindak pidana korupsi efektif dan efisien. Untuk itu KPK sebagai ujung tombak, bekerja sama dengan semua komponen masyarakat; LSM, pers, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membudayakan gerakan antikorupsi dalam rangka penanggulangan korupsi di Indonesia

**Gambar: 1.1**  
**Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi (KPK, 2015)**



**Sumber: [acch.kpk.id/statistik tindak pidana korupsi](http://acch.kpk.id/statistik_tindak_pidana_korupsi)**

Pada tabel di atas rekapitulasi penindakan pidana korupsi per 31 Januari 2016 KPK melakukan, di tahun 2016 KPK melakukan penyelidikan 10 perkara, penyidikan 7 perkara, penuntutan 7 perkara, inkracht 1 perkara dan eksekusi 5 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2016 adalah penyelidikan 762 perkara, penyidikan 475 perkara, penuntutan 396 perkara, dan eksekusi 338 perkara.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>ACCH KPK, *Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi*, lihat: [acch.kpk.id/statistik tindak pidana korupsi](http://acch.kpk.id/statistik_tindak_pidana_korupsi). Di akses 19 Januari 2016

**Tabel 1.1**

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2016

(per 31 Januari 2016)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	10	762
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	7	475
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	7	396
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37	1	321
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	5	338

**Sumber: [acch.kpk.id/statistik tindak pidana korupsi](http://acch.kpk.id/statistik-tindak-pidana-korupsi)**

Berdasarkan tabel di atas tampak efektivitas KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dalam penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Sampai tahun 2014, menurut Bambang Widjojanto yang mengutip pendapat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, bahwa kepala daerah yang terlibat korupsi saja sudah mencapai 290 orang. Sementara jumlah anggota DPRD yang terlibat korupsi sekitar 3.600 orang.<sup>8</sup>

Dengan melihat perjalanan sejarah lembaga antikorupsi di tanah air, kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memang tidak pernah mudah. Upaya membentuk badan khusus untuk memberantas korupsi, dengan kewenangan khusus, seringkali dihadapi langsung dengan upaya pelemahan, tentunya pihak-pihak yang merasa terancam dengan keberadaan lembaga semacam itu.<sup>9</sup>

Selama berdirinya KPK sampai saat ini banyak perseteruan yang terjadi antara KPK dan lembaga lain, seperti DPR dan kepolisian. DPR sejak periode

<sup>8</sup>M Subhan SD. 2015. KPK, *Haruskah Layu Sebelum Benar-benar Bermekaran?*. Online. Kompas.<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/24/03500091/KPK.Haruskah.Layu.Sebelum.Benar-benar.Bermekaran.?page=all> diakses 6 Agustus 2015.

<sup>9</sup>Denny Indrayana. *Op. cit.*Hlm 39

2009-2014 memang berulang kali mencoba melemahkan KPK, baik dengan pemangkasan wewenang sampai rencana pembubaran KPK. Wacana pembubaran KPK bahkan sudah santer sejak KPK pada era Antasari Azhar dan Busyro Muqoddas.<sup>10</sup> Perseteruan yang terjadi antara KPK dengan Polri dikenal masyarakat dengan slogan “Cicak vs Buaya”<sup>11</sup>. Konflik antara KPK dengan Polri sudah tiga kali terjadi sejak berdirinya KPK sampai pada saat sekarang ini.

Tindakan paling riil pelemahan terhadap KPK adalah kriminalisasi dua unsur pimpinan KPK, yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang dituduh menerima suap dari Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu tahun 2009, melalui adiknya, Anggoro Widjojo. Konflik pertama antara KPK dengan Polri terjadi setelah KPK menyadap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji yang diduga menerima gratifikasi terkait Bank Century. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai cicak versus buaya jilid 1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dengan membentuk Tim Delapan yang memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menggunakan hak abolisinya untuk memerintahkan penghentian kasus tersebut.<sup>12</sup>

Konflik kedua terjadi pada tahun 2012 Setelah KPK menggeledah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan menetapkan mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek simulator

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Dalam wawancara Tempo dengan Susno Duadji yang dimuat di Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009, Susno menggoblok-goblokkan KPK yang dinilainya bodoh karena berani dengan Polri, khususnya dengan Kabareskrim (dia sendiri). Padahal, menurutnya, dia tidak bersalah. Dari sinilah muncul istilah Susno, “cicak” melawan “buaya,” yang kemudian sangat populer itu.

<sup>12</sup>*Ibid.*



berkendara. Kasus ini membuat Polri terganggu yang mengakibatkan perseteruan KPK dan Polri. Aparat kepolisian kemudian mengepung gedung KPK dengan alasan menangkap Novel Baswedan, penyidik KPK asal Polri, yang sangat berperan dalam pengusutan kasus Korlantas. Novel dituduh menganiaya tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004. Polri menagani kasus ini setelah kasus Korlantas dibongkar KPK, hal ini membuat Publik merespons peristiwa ini dengan menjaga gedung KPK.<sup>13</sup>



Konflik yang terbaru terjadi pada awal tahun 2015 terkait penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri. Namun sehari sebelum nama BG diajukan ke DPR, KPK menetapkan BG sebagai tersangka kasus rekening gendut. Hingga akhirnya Polri merespons dengan ditetapkannya sebagai tersangka satu persatu para Komisioner KPK. Pertama pelemahan terhadap KPK, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan dituduh dalam kasus perbuatan menyuruh memberi keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Selanjutnya Ketua KPK Abraham Samad juga dijadikan tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen yang mengakibatkan kedua unsur pimpinan KPK itu akhirnya dinonaktifkan.<sup>14</sup>

Kasus yang menjerat para pimpinan KPK dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap Institusi KPK. Konflik antar lembaga penegak hukum ini akhirnya mendapat perhatian publik. Masyarakat memberikan dukungan dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid.*

bentuk aksi berkumpul di gedung KPK secara spontanitas. Dukungan terhadap KPK muncul karena KPK dipercaya sebagai lembaga yang mampu memberantas korupsi lebih baik daripada lembaga lainnya.

Di Indonesia, ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap KPK terkait konflik KPK dengan Polri yang ke tiga. *Pertama*, berawal dari penetapan tersangka dan penangkapan oleh kepolisian terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengejutkan publik. Keputusan Polri ini mengundang reaksi keras dari sejumlah aktivis antikorupsi dengan mendatangi gedung KPK. Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil beramai-ramai mendatangi gedung lembaga antikorupsi untuk memberi dukungan moril. Mereka menilai penetapan tersangka terhadap Bambang adalah bentuk pelemahan terhadap KPK.<sup>15</sup>

Beberapa aktivis antikorupsi yang terlihat di gedung KPK di antaranya Fadjoel Rahman, Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra, Direktur Pukat Zainal Arifin Mochtar, Koordinator Kontras Haris Azhar, Koordinator ICW Ade Irawan, Peneliti ICW Emerson Yuntho dan juga terlihat mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Republika. *BW Tersangka, Aktivis Antikorupsi Ramai-Ramai Berkumpul Dukung KPK* lihat: [m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/23/nim75k-bw-tersangka-aktivis-antikorupsi-ramairamai-berkumpul-dukung-kpk](http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/23/nim75k-bw-tersangka-aktivis-antikorupsi-ramairamai-berkumpul-dukung-kpk) diakses 22 Desember 2015.

<sup>16</sup>*Ibid.*

*Kedua*, dukungan terhadap KPK tidak hanya dari kalangan akademis LSM maupun mahasiswa saja, tetapi juga dari kalangan petani. Pada Sabtu malam, 7 Februari 2015 Komunitas Petani Batang yang tergabung dalam Omah Tani Batang menggelar aksi ruwatan di gedung KPK. Sekitar 200 orang petani dari Batang mendatangi gedung KPK untuk menggelar aksi dukungan terhadap KPK. Dalam aksi ini mereka menggelar beberapa acara tradisional diantaranya ruwatan, tarian Topeng Ireng, membatik dan lain-lain.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Pada 10 dan 11 Februari 2015 Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar acara nonton film bertema antikorupsi di halaman gedung KPK. Acara ini merupakan bagian dari serangkaian acara yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendukung KPK. Aksi gerakan antikorupsi juga datang dari kalangan komunitas kreatif. Mereka mengadakan aksi dukungan terhadap KPK dengan melakukan aksi yang cukup unik, yaitu dengan menggelar sablon gratis antikorupsi di area *Car Free Day* (CFD) Bundaran HI pada Minggu 15 Februari 2015.<sup>18</sup>

*Keempat*, pada 16 Februari 2015 massa yang tergabung dalam gerakan Satu Padu lawan Koruptor (SAPU KORUPTOR) menggelar aksi di depan Balai kota DKI Jakarta dengan membawa sapu sebagai simbol untuk membersihkan para koruptor yang ada di negeri ini. Aksi ini merupakan keprihatinan dari masyarakat sipil atas pelemahan dan kriminalisasi terhadap KPK. Masyarakat yang terdiri dari pegiat antikorupsi, rakyat miskin kota, petani, nelayan, buruh,

---

<sup>17</sup>Jurnal KMS. *Aksi Koalisi Masyarakat Sipil antikorupsi Indonesia*. Lihat: [https://ti.or.id/media/document/2015/03/06/j/u/jurnal\\_kms.pdf](https://ti.or.id/media/document/2015/03/06/j/u/jurnal_kms.pdf) diakses 19 Januari 2016 . hlm 1

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 2



mahasiswa, seniman, tokoh masyarakat, aktivis hukum dan HAM dan seluruh lapisan masyarakat anti korupsi menyatakan bahwa Indonesia Darurat Korupsi dan menyerukan agar seluruh masyarakat melakukan perlawanan balik terhadap koruptor. Aksi tersebut juga serentak dilakukan di 26 kota di Indonesia diantaranya: Padang, Makassar, Surabaya, Bandung, Lampung, Medan, Yogyakarta, Karawang, Bulukumba, Palopo, Semarang, Palu, Kupang, Manado, Kendari, Bogor, Jakarta, Jayapura, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Enrekang, Samarinda. Dalam aksinya Gerakan Sapu Koruptor menuntut agar Presiden RI Jokowi mendengar suara rakyatnya untuk berani secara tegas melakukan tindakan-tindakan.<sup>19</sup>

*Kelima*, pada tanggal 26-27 Februari 2015 Gerakan Masyarakat Sipil yang terdiri dari 125 individu dari 85 organisasi dari Aceh sampai Papua yang berkumpul dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Antikorupsi di Depok - Jawa Barat. Gerakan Koalisi Masyarakat sipil menyoroti pelemahan KPK, goyahnya sendi-sendi penegakan hukum dan kenegarawanan, serta ancaman terhadap agenda politik pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokowi dan Kabinet Kerja. Dari gerakan ini juga menuntut janji-janji politik Presiden Jokowi pada waktu kampanye dalam agenda pemberantasan korupsi dan turun tangan dalam menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm 4

<sup>20</sup>Jikalauhari.co.id. *Urgensi Penyelamatan Agenda Antikorupsi di Indonesia*. Online. [http://jikalauhari.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=233%3Aurgensi-penyelamatan-agenda-antikorupsi-di-indonesia&catid=39%3Ajikalauhari-news&Itemid=134&lang=id](http://jikalauhari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Aurgensi-penyelamatan-agenda-antikorupsi-di-indonesia&catid=39%3Ajikalauhari-news&Itemid=134&lang=id) diakses 08 Agustus 2015

**Tabel 1.2**  
**Gerakan Masyarakat Sipil Antikorupsi di Pusat**

No	Tanggal Dan Tempat	Bentuk Aksi
1	23 Januari 2015 di Gedung KPK	Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil beramai-ramai mendatangi gedung lembaga antikorupsi untuk memberi dukungan moril
2	7 Februari 2015 di Gedung KPK	Sekitar 200 orang petani dari Batang mendatangi gedung KPK untuk menggelar aksi dukungan terhadap KPK. Dalam aksi ini mereka menggelar beberapa acara tradisional diantaranya ruwatan, tarian Topeng Ireng, membatik dan lain-lain
3	10-11 Februari 2015 di halaman gedung KPK	Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar acara nonton film bertema antikorupsi di halaman gedung KPK. Acara ini merupakan bagian dari serangkaian acara yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendukung KPK
4	15 Februari 2015 di Bundaran HI	Aksi gerakan antikorupsi juga datang dari kalangan komunitas kreatif. Mereka mengadakan aksi dukungan terhadap KPK dengan melakukan aksi yang cukup unik, yaitu dengan menggelar sablon gratis antikorupsi di area <i>Car Free Day</i> (CFD) Bundaran HI
5	16 Februari 2015 di depan Balaikota DKI Jakarta	Massa yang tergabung dalam gerakan SAPU KORUPTOR (Satu Padu lawan Koruptor) menggelar aksi di depan Balaikota DKI Jakarta dengan membawa sapu sebagai simbol untuk membersihkan para koruptor yang ada di Negeri ini. Aksi ini merupakan keprihatinan dari masyarakat sipil atas pelemahan dan kriminalisasi terhadap KPK.
6	26-27 Februari 2015 di Depok - Jawa Bara	Gerakan itu bernama Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 125 individu dari 85 organisasi dari Aceh sampai Papua yang berkumpul dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Antikorupsi di Depok - Jawa Barat. Gerakan Koalisi Masyarakat sipil menyoroti pelemahan KPK, goyahnya sendi-sendi penegakan hukum dan kenegarawanan, serta ancaman terhadap agenda politik pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokowi dan Kabinet Kerja

**Sumber : Diolah Peneliti dari Berbagai Sumber**

Dari data di atas merupakan beberapa gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memberi dukungan terhadap KPK. Dukungan yang datang tidak hanya dari kalangan tokoh nasional, akademisi maupun dari LSM yang fokus dalam masalah korupsi di Indonesia, tetapi dari kalangan seniman, budayawan dan kelompok tani yang memberikan bentuk dukungan seperti aksi demonstrasi, pernyataan sikap, dan berbagai kegiatan lain yang bisa memberikan pencerdasan kepada masyarakat luas bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan KPK sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi.

Di Sumatera Barat masyarakat sipil melakukan gerakan antikorupsi pertama kali oleh Koalisi Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) pada tahun 2002. Berawal dari Diskusi Mingguan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang pada awal Januari 2002, dihadiri berbagai kalangan masyarakat (praktisi hukum, akademisi, aktivis LSM, mahasiswa, jurnalis bahkan pengusaha) dengan topik Analisis Kritis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar tahun 2002. Aksi kolektif di Padang yang terjadi pada tahun 2002 akhirnya memaksa penegak hukum mengadili 43 dari 44 anggota dewan terkait korupsi berjamaah anggota DPRD provinsi Sumatera Barat.<sup>21</sup>

Gerakan antikorupsi yang dilakukan masyarakat sipil Sumatera Barat tidak hanya dilakukan oleh FPSB mengenai korupsi berjamaah anggota DPRD Sumbar. Gerakan antikorupsi juga dilakukan oleh masyarakat sipil Sumatera Barat terkait Konflik KPK dengan Polri. Setidaknya sudah terjadi tiga kali konflik yang terjadi

---

<sup>21</sup>Anti Korupsi Daerah, *Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB)*, <https://antikorupsidaerah.wordpress.com/about/> diakses 3 Mei 2016.

antara KPK dengan Polri dalam kurun waktu sejak berdirinya KPK dengan Polri sekarang.

*Pertama*, terjadi pada tahun 2009 awal terjadi konflik KPK dengan Polri dengan slogan “Cicak vs Buaya” masyarakat sipil Sumbar juga merespons dengan melakukan gerakan untuk mendukung KPK dan tidak ingin KPK dilemahkan bahkan sampai dibubarkan sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. PUSaKO Unand dan LBH Padang waktu itu mencoba mengkonsolidasikan masyarakat sipil Sumbar untuk membangun gerakan di Sumatera Barat.<sup>22</sup> Proses konsolidasi gerakan masyarakat sipil Sumbar pada waktu itu dilakukan di kantor LBH Padang yang di ikuti oleh kalangan akademisi, LSM dan organisasi mahasiswa. LBH Padang selalu menjadi wadah dari gerakan antikorupsi di Sumatera Barat, sebagai bagian dari masyarakat sipil Sumbar mengeluarkan pernyataan sikap terkait di kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Bentuk gerakan yang dilakukan masyarakat sipil Sumbar melalui aksi demonstrasi dan pernyataan sikap untuk mendukung KPK dalam rangka memberikan pencerdasan kepada masyarakat terkait konflik yang terjadi.<sup>23</sup>

*Kedua*, konflik KPK dengan Polri jilid 2 di tahun 2012, masyarakat sipil Sumatera Barat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK. Gerakan yang

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara pendahuluan dengan Feri Amsari merupakan dosen Hukum Unand dan aktivis antikorupsi Sumbar membahas mengenai gerakan masyarakat sipil Sumbar terkait konflik KPK dengan Polri Jilid 1, 2 dan 3 yang dilaksanakan dikediaman beliau pada tanggal 9 April 2016 pada jam 21.00 Wib.

<sup>23</sup> Era Purnama Sari sebagai Direktur LBH Padang mengatakan, LBH Padang selalu mewadahi dalam Konsolidasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi isu-isu korupsi baik di tingkat lokal maupun nasional. Saat dijumpai di kantor LBH Padang dalam wawancara pendahuluan yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2016.

dilakukan oleh masyarakat sipil Sumbar cenderung sama yang dilakukan pada konflik KPK dengan Polri jilid 1. Proses konsolidasi gerakan ini melibatkan akademisi, LSM, Organisasi mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat yang dilakukan di kantor LBH Padang . pelopor dalam gerakan ini adalah LBH Padang dan PUSaKO Unand karena kedua lembaga ini memiliki jaringan informasi dengan Lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh nasional di Jakarta.<sup>24</sup> Massa aksi yang terlibat dalam gerakan masyarakat sipil pada konflik KPK dengan Polri jilid 1 dan 2 tidak banyak yang terlibat dalam gerakan ini. Gerakan yang dilakukan hanya gerakan reaksional dan tidak berkelanjutan, hal ini dikarenakan respons dari presiden SBY pada masa itu lebih cepat menanggapi dan meminta kedua belah lembaga untuk meredam konflik.<sup>25</sup>

*Ketiga*, konflik KPK dengan Polri jilid 3 yang terjadi pada awal tahun 2015. Konflik yang disebabkan ditetapkan sebagai tersangka Bambang Wijayanto oleh Bareskrim Polri. Proses penetapan tersangka bambang wijayanto menyedot perhatian Publik tak terkecuali masyarakat Sumatera Barat karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penangkapan. Kantor LBH Padang menjadi wadah tempat Konsolidasi masyarakat sipil dalam membangun gerakan untuk mendukung KPK.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Feri Amsari. *op. cit.*

<sup>25</sup>Wawancara pendahuluan dengan Indira Suriani sebagai anggota LBH Padang, Pada waktu itu LBH Padang dalam akses informasi yang valid berkoordinasi dengan LBH Jakarta dalam mengikuti perkembangan Isu di Jakarta terkait konflik KPK dengan Polri jilid 1 dan 2. Saat dijumpai di kantor LBH Padang dalam diskusi pada tanggal 21 Juli 2016.

<sup>26</sup> Hasil wawancara pendahuluan dengan Indira suryani sebagai anggota LBH Padang di kantor LBH Padang pada tanggal 21 Juli 2016



## B. Rumusan Masalah

Dari persoalan di atas yang menjadi menarik bagi peneliti melihat bagaimana gerakan antikorupsi masyarakat sipil Sumatera Barat yang melibatkan akademisi dari perguruan tinggi Sumatera Barat, Tokoh masyarakat, LSM dan aktivis mahasiswa Sumatera Barat yang melakukan gerakan sosial dalam penyelamatan agenda pemberantasan korupsi. Pada konflik KPK dengan Polri Jilid 3 Sumatera Barat mengambil bagian dalam gerakan mendukung KPK dari pelemahan Sistematis. Setidaknya ada 6 aksi dukungan Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi dukungan dalam penyelamatan KPK terkait konflik KPK dengan Polri jilid 3.

**Tabel 1.3**  
**Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Sumatera Barat**

No	Tanggal Aksi	Bentuk Aksi
1	27 Januari 2015	Sejumlah aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi dukungan terhadap penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan kantor Gubernur Sumbar. Pergerakan yang dilakukan di Sumbar ini terdiri dari Akademisi, LSM dan Mahasiswa.
2	12 Februari 2015	Pusat Kajian Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas mengadakan acara aksi solidaritas Save KPK dan seminar. Acara seminar mendatangkan pembicara seperti mantan komisioner Lembaga Penanganan Korupsi Hongkong, Tony Kwok, dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pencerdasan bagi masyarakat dan mahasiswa mengenai dinamika pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi yang sistemik

3	12 Februari 2015	Dilaksanakan aksi foto <i>selfie</i> (swafoto) bersama 2000 aktivis baik yang berasal dari mahasiswa Unand sendiri, juga diikuti oleh pelajar ataupun mahasiswa lain yang berasal dari luar kampus. Semua foto ini kemudian di unggah ke akun sosial seperti Twitter, Path, Facebook, dan Instagram dengan hashtag #SaveKPK. Hal ini untuk menunjukkan dukungan masyarakat akan gerakan perlawanan mafia hukum di Indonesia, terutama kasus KPK-Polri
4	13 Februari 2015	Puluhan mahasiswa Universitas Andalas, menggelar orasi sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga KPK di bundaran kantor Pos. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengumpulkan 10 ribu tanda tangan di lembaran kain putih dari setiap pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut
5	16 Februari 2015	Koalisi Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) Senin (16/2) dalam Gerakan Satu Padu (Sapu) Koruptor melakukan aksi damai menyerukan penyelamatan KPK di depan kantor Gubernur Sumbar. Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat terdiri dari berbagai elemen masyarakat diantaranya, LBH Padang, PBHI Prov. Sumbar, UKM PHP Unand, LAM-PK Unand, BEM Unand, BEM UNP, Koalisi Perempuan Indonesia, PUSaKO Unand, serta penggiat antikorupsi Sumbar untuk mendukung penyelamatan KPK
6	23 Februari 2015	Ratusan mahasiswa bersama alumni, dosen dan Rektor Universitas Andalas (Unand) menggelar aksi dukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bundaran Kampus Unand pada hari Senin. Demi terwujudnya kejayaan bangsa melalui upaya pemberantasan korupsi, maka civitas academia dan alumni Unand menyatakan sikap diantaranya, meminta Presiden memerintahkan kepolisian untuk menghentikan kriminalisasi atau upaya pembedaan terhadap pimpinan KPK

**Sumber: Diolah Peneliti dari Berbagai Sumber**

Berdasarkan data di atas, bahwa gerakan kolektif yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar terkait konflik KPK dan Polri jilid 3 lebih terkonsolidasi lebih baik dan diikuti oleh masa aksi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan yang dilakukan pada konflik KPK dengan Polri jilid 1 dan 2. Aksi kolektif yang dilakukan tidak hanya sekali, bahkan banyak bentuk aksi dukungan yang dilakukan melalui penggalangan tanda tangan, aksi selfe anti korupsi, seminar dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat serta aksi pernyataan sikap untuk memberikan dukungan terhadap KPK. Gerakan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menarik untuk diteliti terkait Mobilisasi dan proses pembingkaihan yang dilakukan oleh LBH Padang dan PUSaKO Unand sehingga gerakan ini terkonsolidasi dengan baik jika dibandingkan dengan aksi-aksi Save KPK sebelumnya.

Proses struktur mobilisasi merupakan sebuah sarana kolektif baik dalam lembaga formal dan juga informal. Melalui sarana tersebut, masyarakat memobilisasi sumberdaya yang tersedia dan berbaur dalam aksi bersama. Konsep ini berkonsentrasi kepada jaringan informal, organisasi gerakan sosial dan kelompok-kelompok perlawanan ditingkat meso.<sup>27</sup> Jika dibandingkan gerakan Save KPK jilid 1 dan 2, maka gerakan Save KPK jilid 3 ini lebih banyak diikuti oleh sipil dalam aksi kolektif menyelamatkan KPK. Massa Aksi dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar yang diikuti dari kalangan akademisi, LSM, mahasiswa serta tokoh yang berpengaruh di Sumbar seperti Rektor Unand, Prof. Saldi Isra,

---

<sup>27</sup> Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: teori dan Praktik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013 Hlm38

Prof. Mestika Zed dan Prof. Yuliandri. oleh mengindikasikan berhasilnya mobilisasi sumberdaya yang dilakukan.

Para akademisi gerakan sosial modern juga mempergunakan teori proses *framing* dalam memahami sukses dan gagalnya sebuah gerakan sosial. Hal ini, berkaitan dengan upaya pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan *framing* atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan.<sup>28</sup> Dalam gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar yang menjadi permasalahan adalah permasalahan pelemahan terhadap KPK. Hal ini lah yang menjadi yang menjadi dasar dalam pembentukan *framing* untuk memberikan dukungan terhadap KPK. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar seperti: *selfie* (swafoto) antikorupsi, penggalangan tanda tangan untuk mendukung KPK dan seminar yang bertemakan “Jangan Biarkan KPK Bekerja Sendiri” mengindikasikan adanya *framing* sangat baik.

Dalam gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar LBH Padang<sup>29</sup> dan PUSaKO Unand<sup>30</sup> yang lebih dominan dalam melakukan proses *framing* dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 41

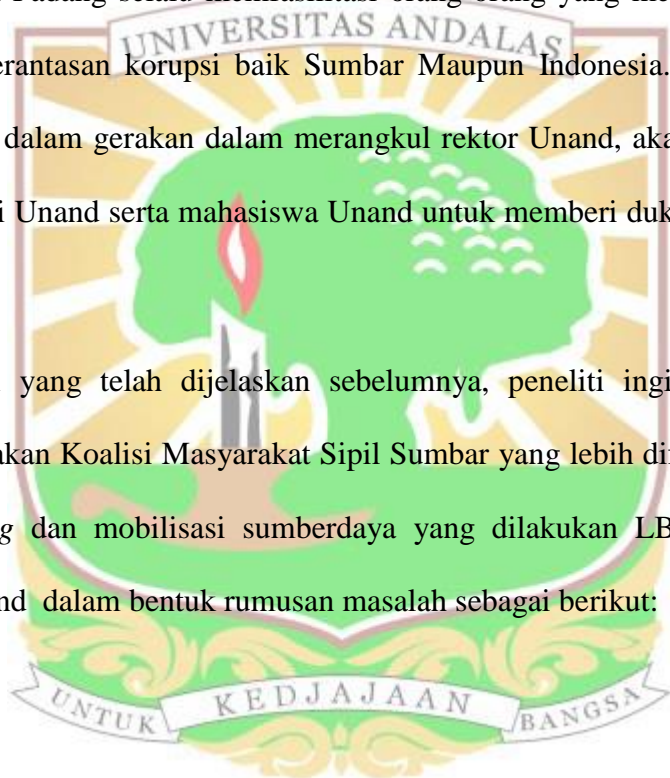
<sup>29</sup> Era Purnama Sari sebagai direktur LBH Sumbar mengatakan, LBH Padang selalu menjadi wadah dari gerakan antikorupsi di Sumbar, dari mulai FPSB, Konflik KPK jilid 1, Konflik KPK jilid 2 dan Konflik KPK jilid 3 LBH Padang aktif membahas masalah pelemahan terhadap lembaga pemberantasan korupsi bersama LSM, akademisi dan mahasiswa. Pada konflik KPK dengan Polri jilid 3 LBH Padang dan PUSaKO merespons cepat dengan melakukan konsolidasi dengan masyarakat sipil sumbar untuk memberi dukungan terhadap KPK sebagai ujung tombak pemberantasan Korupsi. LBH Padang memiliki akses informasi dengan LBH Jakarta lebih valid dalam mengetahui perkembangan konflik yang terjadi di Jakarta. Kebetulan waktu itu saya (Era Purnama Sari) sedang di Jakarta mengkoordinasikan rekannya di Padang untuk melakukan konsolidasi di Padang. Saat di jumpai di kantor LBH Padang pada tanggal 21 Juli 2016.

<sup>30</sup> Hasil wawancara pendahuluan dengan Feri Amsari merupakan dosen Hukum Unand dan aktivis antikorupsi Sumbar mengatakan, PUSaKO memiliki akses dengan tokoh nasional seperti Direktur Pukat Zainal Arifin Mochtar, Koordinator Kontras Haris Azhar, Koordinator ICW Ade Irawan,



mobilisasi sumberdaya karena dua lembaga ini menjadi aktor gerakan dari Kaolisi masyarakat sipil Sumbar. Kedua lembaga ini juga memiliki jaringan dan akses informasi dengan lembaga-lembaga serta tokoh-tokoh dan aktivis antikorupsi di pusat.<sup>31</sup> Pada konflik KPK dengan Polri jilid 3 LBH Padang dan PUSaKO merespons cepat dengan melakukan konsolidasi dengan masyarakat sipil Sumbar untuk memberi dukungan terhadap KPK sebagai ujung tombak pemberantasan Korupsi. LBH Padang selalu memfasilitasi orang-orang yang mendukung dalam agenda pemberantasan korupsi baik Sumbar Maupun Indonesia. PUSaKO juga menjadi aktor dalam gerakan dalam merangkul rektor Unand, akademisi kampus Unand, alumni Unand serta mahasiswa Unand untuk memberi dukungan terhadap KPK

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin merumuskan penelitian gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar yang lebih difokuskan dalam proses *framing* dan mobilisasi sumberdaya yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:



---

Peneliti ICW Emerson Yuntho dan juga terlihat mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Pada penetapan Bambang Wijayanto oleh Bareskrim Prof. Saldi Isra dan Charles Simabura Juga berada di Jakarta untuk memberikan dukungan di gedung KPK. dilaksanakan dikediaman beliau pada tanggal 10 Juli 2016 pada jam 21.00 Wib.

<sup>31</sup> Alek Karci Kurniawan sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Politik Ukm PHP Unand Periode 2014-2015 mengatakan, LBH Padang dan PUSaKO Unand merupakan pelopor dari gerakan masyarakat sipil di Sumatera Barat. LBH Padang selalu memfasilitasi orang-orang yang mendukung dalam agenda pemberantasan korupsi baik Sumbar Maupun Indonesia. PUSaKO juga menjadi aktor dalam gerakan dalam merangkul rektor Unand, akademisi kampus Unand, alumni Unand serta mahasiswa Unand untuk memberi dukungan terhadap KPK. Kedua lembaga ini memiliki jaringan nasional dalam memperoleh akses informasi dari perkembangan isu konflik KPK dengan Polri. Saat di jumpai di kosnya pada tanggal 29 Juli 2016.



1. Bagaimana proses framing yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam membangun gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar terkait konflik KPK dengan Polri jilid 3?
2. Bagaimana mobilisasi sumberdaya yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam membangun gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar terkait konflik KPK dengan Polri jilid 3?

### C. Tujuan Penelitian

Dari konflik KPK dengan Polri jilid 3, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar melakukan gerakan sosial dalam penyelamatan KPK. Masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam penyelamatan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyaknya respons dukungan dari masyarakat sipil untuk KPK terhadap konflik KPK dengan Polri, sangat menarik untuk melihat proses *framing* dan mobilisasi dalam gerakan penyelamatan KPK terutama di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memetakan proses framing yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam membangun gerakan Koalisi masyarakat sipil terkait konflik KPK dengan Polri jilid 3.
2. Memetakan mobilisasi sumberdaya yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam membangun gerakan koalisi masyarakat sipil terkait konflik KPK dengan Polri jilid 3.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek akademis, aspek praktis, dan aspek sosial.

1. Secara akademis (studi tentang gerakan sosial), penelitian ini untuk menjelaskan gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar dalam agenda penyelamatan KPK terkait konflik antara KPK dengan Polri serta memetakan proses *framing* dan mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam membentuk gerakan sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil dalam gerakan sosial terutama dalam gerakan penyelamatan KPK di Sumbar
3. Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat dalam melihat fenomena politik yang terjadi terutama yang bersangkutan langsung dengan masyarakat terkait penyelamatan agenda pemberantasan korupsi Indonesia.

